

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN WAKALAH WALI DALAM AKAD  
NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN BANGKINANG**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**DISUSUN OLEH :**

**KHAIRUL AZMI**  
**NIM. 11721101181**

**PROGRAM SI**  
**JURUSAN HUKUM KELUARGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**1442 H / 2020 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakalah Wali Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Bangkinang”** yang di tulis oleh :

Nama : Khairul Azmi  
 Nim : 11721101181  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat di terima dan di setujui untuk di ajukan dalam sidang Munaqasyah fakultas syariah dan hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 1442H  
 9 Juli 2021M

Pembimbing Skripsi

H. Rahman Alwi, M.Ag  
 NIP. 19700621 199803 1003

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANGKINANG”**, yang ditulis oleh:

Nama : **KHAIRUL AZMI**  
 NIM : **11721101181**  
 Program Studi : **Hukum Keluarga (AH)**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Jum'at, 06 Agustus 2021**  
 Waktu : **08.00 WIB**  
 Tempat : **Daring / online**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 08 Agustus 2021**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris  
**Amad Fauzi, SHL., MA**

Penguji I  
**Dr. Yusran Sabili, MAg**

Penguji II  
**Dr. H. Zainal Arifin, MA**

*(Signatures of the examiners)*

**UIN SUSKA RIAU**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005







### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Khairul Azmi 2021: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakalah Wali Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang**

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, dan hukum islam.

Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dengan diikat suatu pertalian yang disebut pernikahan. Suatu pernikahan dikatakan sah apabila pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Yang tercantum pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan keabsahan suatu pernikahan.

wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurangnya cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Wakalah Wali dalam Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang, serta untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Wakalah Wali dalam Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif.

Pelaksanaan pelaksanaan Wakalah Wali dalam Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang di pengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah (i) Masyarakat lebih percaya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang dari pada diri sendiri (ii) Wali kurang mampu mengucapkan *lafalz* akad nikah (iii) Enggan untuk menikahkan mempelai (vi) Faktor Sakit (v) Wali tidak diketahui tempat tinggalnya. Adapun tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Wakalah Wali dalam Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang yaitu pada dasarnya sudah menjadi budaya masyarakat tersebut. sehingga banyak masyarakat bangkinang yang ketika melaksanakan akad nikah hak perwalian diwakilkan kepada pegawai yang memimpin dan menyaksikan jalannya akad nikah tersebut. Sedangkan jika ditinjau dari hukum Islamnya bahwanya pelaksanaan wakalah wali di bolehkan baik secara mutlak maupun muqayyad.

**Kata Kunci : Perwalian, Hak perwalian, dalam Akad Nikah.**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad Saw. dimana atas berkat perjuangan beliau lah kita merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan sekarang ini sampai akhir hayat nanti.

### **SKRIPSI INI BERJUDUL “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANGKINANG”**

skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan semua itu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, ayahanda (Muhammad Haidir), ibunda (Erliana), yang telah memberikan dukungan, juga bimbingan, dan selalu mendoakan tiada henti serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moral maupun materil demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Ade Fariz Fahrullah M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak H. Rahman alwi M.A, selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan serta arahan yang telah bapak berikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai selama mengikuti bangku perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

11. Dan yang tersayang buat adek adek saya Khairul Anwar, Khairul Azman, Khairul Azlan, Muhammad Azwan Mulidi, Dan adek saya tercinta Nur Azuraa, terimakasih sudah menyayangi saya sebagai abang.
12. Teman-teman satu kontrakan golak-golak mosamo terkhusus Hary Irwansyah yang telah memotivasi dan Muhajir, M. Nur Aditia dan Anwar Fauzan Afif membuat penulis skripsi menjadi bersemangat untuk melanjutkan skripsi dengan nuansa kebersamaan yang di berikan.
13. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2017 terkhusus Sahabat Squad dan Semoga Selalu Basamo terimakasih atas segala motivasi dan juga saran selama penulisan skripsi ini.
14. Spesial teruntuk Nurul Nabila S.H. yang telah memberikan pengorbanan yang tak terhingga serta telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini, termasuk penulis yang pastinya tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini ke depannya. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat, serta perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan aplikasinya pada masyarakat.

Pekanbaru, 1 Juli 2021

Penulis,

**KHAIRUL AZMI**  
**NIM. 11721101181**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Keberadaan Kantor Urusan Agama Bangkinang .....	20
B. Visi dan misi Kantor urusan agama (KUA) kec Bangkinang.....	23
C. Tugas dan Tanggung Jawab Kantor urusan agama (KUA) kecamatan Bangkinang.....	24
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Wali Nikah.....	28
B. Konsep Wakalah.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Wakalah Wali dalam akad nikah di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Bangkinang.....	56





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

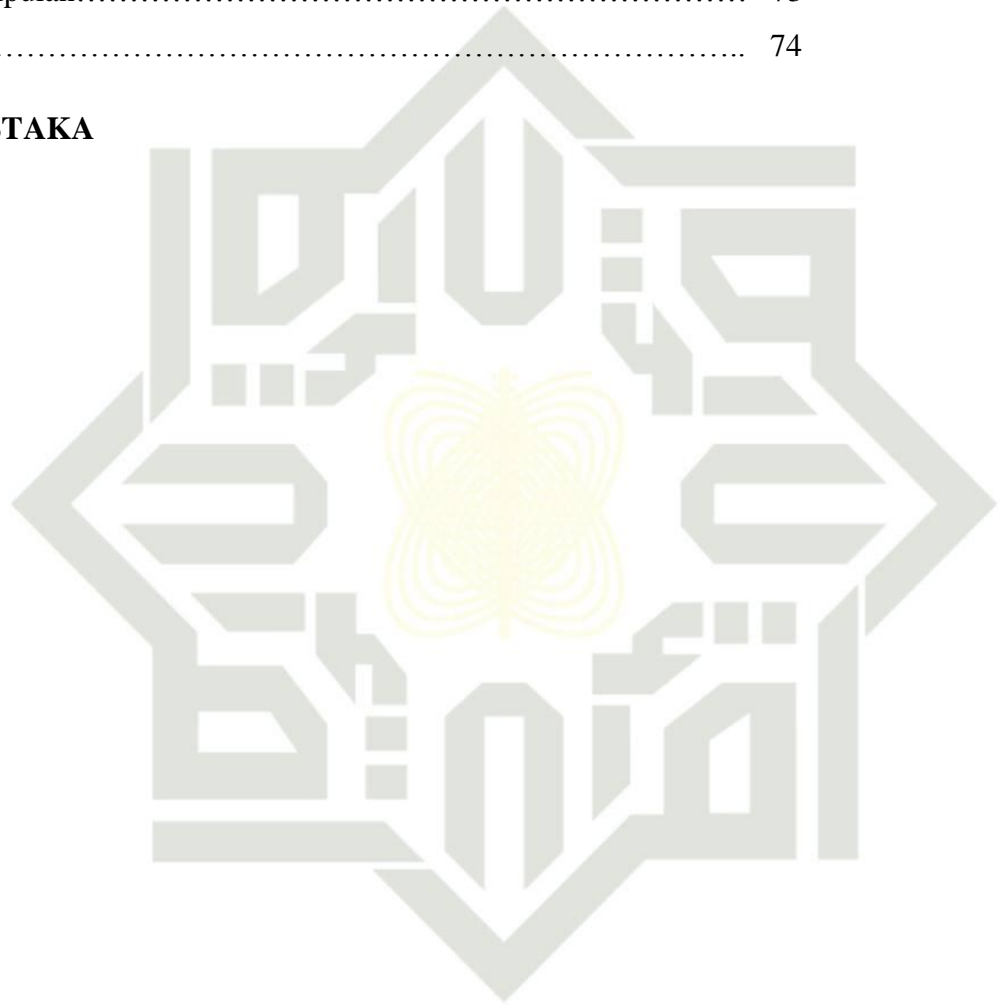
B. Tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Wakalah Wali dalam akad nikah di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Bangkinang .....	65
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

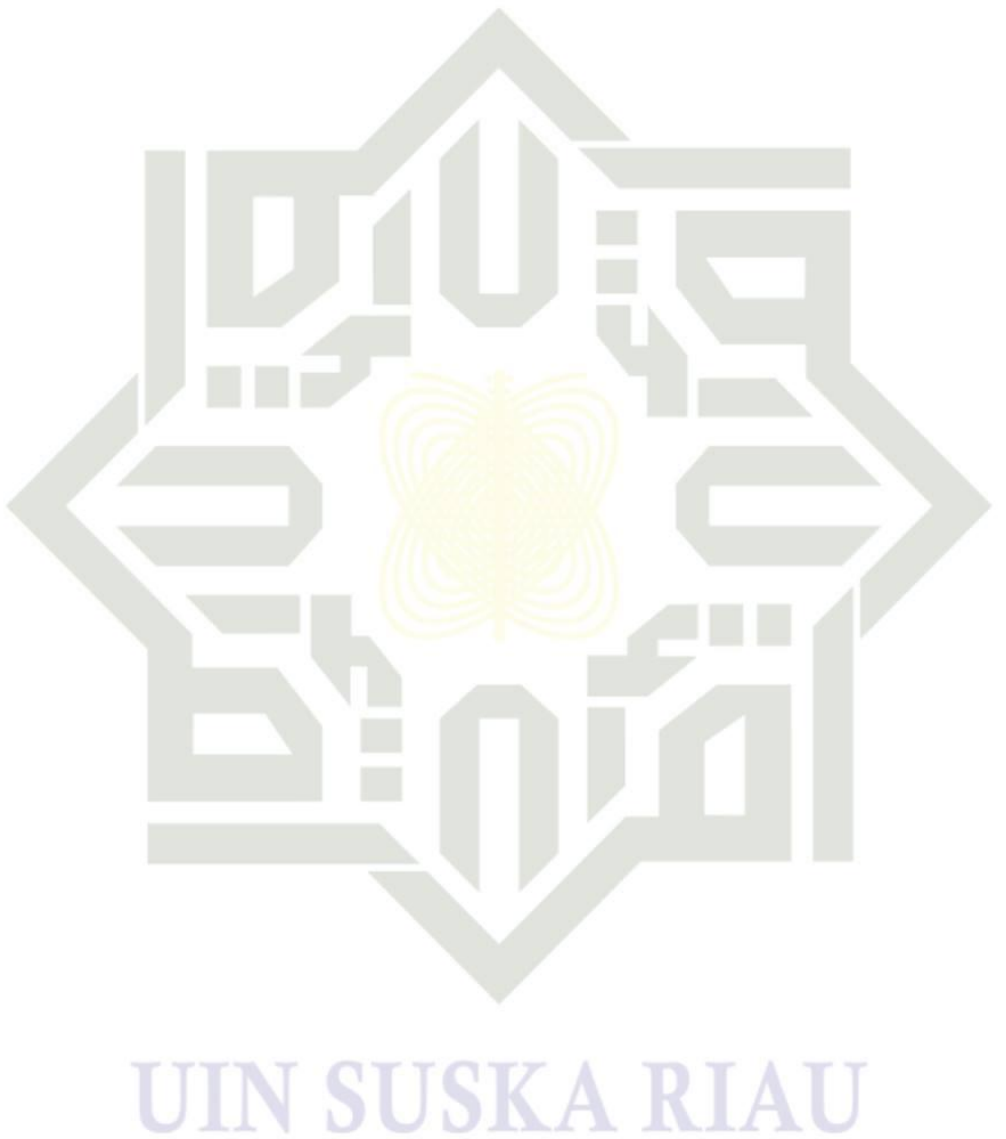
**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Table 1.....	63
----------------------------------	--------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagiadan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karna di bentuk menurut undang undang yang mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan yang tidak formal yang di bentuk dengan kemauan bersamayang sungguh sungguh mengikat kedua belah pihak.

Syarat-syarat dalam sebuah pernikahan, yang pertama harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, yang kedua untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua/salah satu atau wali, bila ternyata kedua orang tua sudah meninggal. Kedua hal tersebut diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang perkawinan tahun 1974.<sup>1</sup>

Apabila dalam syarat-syarat tersebut diatas tidak terpenuhi, maka perempuan yang telah dikawinkan dengan tanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya itu dapat minta fasakh, minta dirusakkan nikahnya kepada hakim.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.hal 76



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan memiliki syarat dan rukun di antaranya ada seorang wali nikah. Wali dalam perkawinan merupakan rukun, artinya harus ada dalam perkawinan bagi seorang calon isteri. Tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah terutama perkawinan orang yang belum mukallaf, wali adalah orang yang memegang sah atau tidak sahnya pernikahan.

Bersabda Rasulullah :

7558 رواه الطبراني، وهو في صحيح الجامع (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi.” (HR. Thabrani. Hadits ini juga terdapat dalam kitab *Shahih AlJami’*, no. 7558).<sup>3</sup>

Hal tersebut di perjelas kompilasi hukum islam (KHI) pasal 19 yang menyebutkan bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan nya)<sup>4</sup>

Selanjutnya pada pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah. Pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara

<sup>3</sup> Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, *Al-Mu’jam al-Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1973) hal 1022

<sup>4</sup> *Kompilasi hukum islam*. (Jakarta: Cemerlang t.t) hal. 185

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya ‘adhal/ enggan.<sup>5</sup> Hal itu, sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. الْخَمْسَةُ إِلَّا السَّائِي

Artinya: Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwa dari ‘Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya”. [HR. Khamsah kecuali Nasai]<sup>6</sup>

Selain dari hadits diatas, pembahasan tentang wali nikah juga terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

أَزْوَاجَهُنَّ يَتَكَبَّرْنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا

Artinya :

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..” (QS. Al Baqarah : 232)<sup>7</sup>

يُؤْمِنَنَّ حَتَّى الْمَشْرِكَةِ تَنْكِحُوا وَلَا (سورة البقرة: 221)

Artinya :

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.” (QS. Al Baqarah : 221)<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Anonim, tt, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, dilengkapi KHI Di Indonesia, Surabaya: Ar

kola.

<sup>6</sup> Al-Bukhori, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Ensiklopedia Hadist; Shahih al-Bukhori 1*, terj. Masyar dan Muhammad Suhaidi, Jakarta: Almahira, Cet. 1, 2011

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toba Putra), hal.37

<sup>8</sup> *Ibid.* hal 37.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :

*"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. "(QS. An Nuur: 32)<sup>9</sup>*

Pada intinya, ayat-ayat dan hadits tersebut merupakan dalil yang sangat jelas pembahasannya tentang syarat keberadaan seorang wali dalam pernikahan. Jika walinya menolak menikahkan putrinya dengan lelaki yang dikehendaki tanpa alasan yang dibenarkan syari'at, maka hak perwaliannya berpindah kepada orang yang setelahnya misalnya hak perwalian berpindah dari seorang ayah kepada kakek.

Namun jika semua wali menolak untuk menjadi wali tanpa uzur syar'i, maka hak perwalian beralih kepada penguasa atau wali hakim sebagaimana hadits terdahulu:

لَهُ لِي وَلَا وَلِيٍّ اسْتَجْرُوا فَالْسلطانَ فَإِنْ

Artinya :

*"Dan jika ada perselisihan dari wali keluarga wanita, maka penguasa atau hakimlah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak ada walinya."<sup>10</sup>*

Wali dalam sebuah perkawinan dipersiapkan oleh salah satu mempelai, yaitu oleh mempelai wanita. Wali diartikan sebagai orang yang

<sup>9</sup> Ibid. hal. 38.

<sup>10</sup> <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/almaiyah/article/download/314/236/>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Secara umum yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang akan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Karena ini merupakan rukun dalam perkawinan, maka persyaratan adanya wali harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita untuk menikahkannya. Sebuah perkawinan tanpa adanya wali, dapat dipastikan perkawinan itu tidak sah. Sama halnya dengan persaksian, persoalan wali juga diatur pada pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan tidak sah bila dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah. Syarat untuk menjadi wali antara lain :

1. Seorang wali beragama islam<sup>11</sup>
2. Akil baligh,<sup>12</sup> terhadap baligh ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya “dari Ali r.a dari Nabi SAW bersabda, dibebaskannya tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan, yaitu orang yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil sampai ia bermimpi (baligh) dan orang gila sehingga ia sembuh dari gila” (H.R Abu Daud)
3. Berakal sehat.<sup>13</sup>
4. Laki-laki.
5. Adil.

<sup>11</sup> adalah orang adil, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Tihami, Hari Sahrani, *fiqh munakahat kajian fikih nikah lengkap*, Rajawali press, Jakarta, 2010, hlm. 112.

<sup>12</sup> Maksudnya dilihat dari sisi kemampuan ia berpikir dan bertindak secara sadar dan baik maka seorang yang belum baligh tidak dapat dikatakan dewasa Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam peradilan menurut Hukum Islam*, Cet. I, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1986, hlm. 48.

<sup>13</sup> Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum perdata (BW)*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Merdeka..

7. Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh.

Kompilasi Hukum Islam sendiri mengatur persoalan wali nikah dari pasal 19 hingga pasal 23. Dijelaskan bahwa wali nikah dibagi atas 2 yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab sendiri dijelaskan sebagai wali yang mempunyai hubungan erat atau kekerabatan dengan mempelai wanita. Pengelompokan terhadap wali nasab sendiri diatur pada pasal 21 dan 22 KHI, didalam pasal tersebut telah dikelompokkan menjadi 4 kelompok mereka yang berhak menjadi wali. Kalau disimpulkan atau diurutkan maka rumusan pada pasal 22 KHI itu akan diketahui sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Ayah Kandung
2. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki dari paman sekandung
12. Anak laki-laki dari paman seayah

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*., Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 80-83

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

13. Saudara laki-laki kakek seayah
14. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah

Urutan disini artinya adalah apabila wali pertama tidak dapat menjadi wali, maka wali yang kedua dapat menggantikan posisinya, dan jika wali kedua tidak dapat, hendaklah wali ketiga yang menggantikan posisinya dan begitu seterusnya secara tertib dilakukan. Yang kedua adalah wali hakim, wali hakim dikenal pula didalam perkawinan islam dengan sebutan yang sama yakni wali hakim. Wali hakim diatur pada Kompilasi Hukum Islam pasal 23 yang isinya adalah kedudukan wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada. Dengan tidak adanya wali nasab, maka wali hakim dapat bertindak untuk menggantikan wali nasab berdasarkan atas putusan pengadilan Agama mengenai wali nikah.

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa wali nikah itu dibagi atas 3 macam yaitu wali mujbir, wali hakim, dan wali muhakkam. Wali mujbir adik untuk alih wali yang ada pada wali nasab dan ia berhak memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan, sehingga disebut wali mujbir. Wali mujbir ini hanya terdiri dari ayah dan kakek yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya. Hal ini dilakukan karena gadis



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut tidak pandai memilih jodoh dan apabila dia dibebaskan memilih jodoh ditakutkan akan membawa kerugian baginya.<sup>15</sup>

Namun hak perwalian itu tidak boleh dirampas atau diambil begitu saja tanpa izin dari wali yang sesungguhnya. Bila hal itu dilakukan, maka pernikahan itu tidak sah dan harus dipisahkan saat itu juga.

Untuk bisa menjadi wali, seseorang harus memenuhi syarat standar minimal yang juga telah disusun oleh para ulama, berdasarkan pada ayat Al-quran dan sunnah nabawiyah. Syarat-syaratnya adalah:

1. Islam, seorang ayah yang bukan beragama Islam tidak menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak gadisnya yang muslimah. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada adanya Allah SWT . Dalil haramnya seorang non muslim menikahkan anaknya yang muslimah adalah ayat Quran berikut ini: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang non muslim untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
2. Berakal, maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak syah bila menjadi wali bagi anak gadisnya.
3. Bulugh, maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak syah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya.
4. Merdeka, maka seorang budak tidak syah bila menikahkan anaknya atau anggota familinya, meski pun beragama Islam, berakal, baligh.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan ke 11, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm.42-44

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1968), Juz VI,hal 261.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama memberikan beberapa persyaratan yang dijadikan patokan untuk menjadikan keabsahan sebuah akad yaitu :

1. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan Kabul Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan mahar yang ditentukan.
2. Ijab dan Kabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah membolehkan asal waktunya singkat.
3. Ijab dan Kabul tidak boleh membatasi masa perkawinan tersebut, karena nikah untuk selamanya.
4. Ijab dan Kabul mesti menggunakan lafaz yang terang dan jelas.<sup>17</sup>

Namun demikian, realita dalam kehidupan masyarakat muslim di suatu daerah memperlihatkan fenomena yang berbeda. Vitalitas jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama di saat prosesi akad Nikah. Banyak praktek yang memperlihatkan hal ini, wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakili dalam prosesi akad nikah seperti yang terjadi pada pernikahan antara Yusri dan Tina, mereka menjalin hubungan telah lama dan sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh pihak keluarga wanita, mengetahui perbuatan anaknya yang melebihi batas, Tina adalah anak dari Sanjaya dan Badaa, mengetahui peristiwa itu Sanjaya ingin menikahkan anaknya Tina dengan Yusri. Tetapi ayahnya Tina pun tidak ingin menjadi wali dalam pernikahan itu karena malu dan benci terhadap

<sup>17</sup> Amir syarifudin *hukum perkawinan islam* di Indonesia, antara fikih munakahat dan undang undang perkawinan h.62.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perbuatan anaknya, lalu ayahnya mewakilkan perpindahan hak wali nasab kepada Umar, yaitu adek kandung ayahnya dan begitu juga halnya Umar juga tidak mau menikahkan anak dari abang kandungya, di karenakan malu dan tidak mau menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Di karenakan telah habis rantai perpindahan wali maka Umar mewakilkan perwalian nya kepada kepada Bpk. M. Ilyas yang mana dia adalah orang yang tua di kampung itu dan selaku RW di Dusun Uwai, maka saat itulah Bpk. Ilyas menikahkan Tina dengan Yusri.

Sebelum akad nikah dimulai Maka pihak KUA “Kantor Urusan Agama” bertanya kepada Bpk. M. Ilyas bapak siapanya si Tina ? Bpk. M. Ilyas menjawab saya bukan siapa siapanya Tina dan saya adalah seorang RW, orang yang diwakilkan menjadi wali dari pernikahan Tina, saya di suruh menjadi wali oleh kedua orang tua Tina. lalu pihak KUA menggugat bahwa pernikahan itu tidak bisa di lanjutkan oleh PPN dan menyuruh mendatangkan wali yaitu Bpk. Sanjaya (ayah kandung).

Terjadilah pertentangan antara Bpk. M. Ilyas dengan pihak KUA, saya akan tetap menikahkan Tina dengan Yusri karena kalau tidak dilanjutkan pernikahan maka saya takut dan tidak menginginkan terjadi sesuatu hal di lingkungan saya, dan saya pun ada hubungan juga dengan si anak Tina tapi hubungan jarak keluarga yang jauh, krna mengingat dan menimbang akan terjadinya yang tidak diinginkan maka saya yang telah diwakilkan untuk menikahkan Tina saya akan tetap menjadi wali dalam pernikahan ini karena ayahnya telah menyerahkan dan mempercayakan pernikahan anaknya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

kepada saya. Ayahnya juga tidak di sini bersama ibunya yang terkait kontrak kerja di luar Negeri (Malaysia) dan tidak bisa pulang.<sup>18</sup>

Di akhir penyelesaian perbincangan bahwa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim, karna wali yang telah berwakil tidak boleh berwakil lagi maka jatuh pada wali hakim yaitu bapak (KUA)

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengadakan penelitian tentang bagaimana **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakalah Wali Dalam Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang”**

Penulis memilih meneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang karena Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang sangat menjunjung tinggi visi dan misi yaitu terbentuknya masyarakat Islam, berakhlakul karimah dan terwujudnya pelayanan yang prima di kecamatan Bangkinang profesional dalam tugas ramah dalam pelayanan ikhlas dalam berhikmah maksimal dalam berkerja amanah dalam mengemban tugas.

#### B. Batasan Masalah.

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada bagaimana pendapat masyarakat di daerah Kecamatan Bangkinang terhadap wali akad nikah yang tentunya tidak semua perempuan di Kecamatan Bangkinang memiliki wali yang sedarah atau kandung. Serta peran Kementerian Agama dalam mengatasi permasalahan tentang wakalah ini.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ilyas selaku RW, Dusun Uwai, Kecamatan Bangkinang, pada tanggal 16 Desember 2020.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Wakalah Wali dalam Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Wakalah Wali dalam Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pelaksanaan Wakalah Wali dalam Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang
  - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Wakalah Wali dalam Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara Teoritis
    - 1) Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga terutama yang berkaitan dengan permasalahan wakalah wali pada akad nikah di Kecamatan Bangkinang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Keluarga, terutama yang berkaitan dengan masalah wakalah wali akad nikah di Kecamatan Bangkinang.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran Kementerian Agama dalam mengatasi permasalahan wakalah wali akad nikah di Kecamatan Bangkinang.
- 3) Bagi instansi / pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan keterangan yang jelas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam wakalah perwalian akad nikah di Kecamatan Bangkinang.

c. Secara Akademis

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).
- 2) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Keluarga.
- 3) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.



## E. Metode Penelitian

Menurut Hasan dalam bukunya *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (*metdhos* = tata cara), dalam penelitian ini tercakup prosedur penelitian dan teknik penelitian.<sup>19</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian sosilogis hukum dengan metode penelitian lapangan (*field reseach*) untuk mengumpulkan data primer dengan melalui observasi, dan wawancara. Sedangkan data sekunder data yang didapatkan langsung dari buku buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut karna lokasinya mudah dijangkau pada penulis.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek, Penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah wali akad nikah yang terkait dengan permasalahan wakalah wali yang terjadi pada KUA kec. Bangkinang dengan menggunakan wawancara.

<sup>19</sup> Hasan, M Iqbal .*Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.Bogor: Ghalia Indonesia t.t2000.hal 1-3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah orang yang terlibat dalam pelaksanaan wakalah wali yang terjadi pada KUA kec. Bangkinang adalah Kepala KUA, PPN KUA, RT 02 RW 02 Desa muara uwai, dan masyarakat Desa muara uwai.

**b. Objek Penelitian.**

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah tinjauan hukum Islam terhadap perwalian akad nikah yang berwakil kecamatan Bangkinang.

**4. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelum oleh penelitian untuk dipelajari dan di tarik kesimpulan nya. Penelitian ini yang menjadi populasi adalah: orang yang terlibat dalam pelaksanaan wakalah wali yaitu 1 orang Kepala KUA, 1 orang RT 02 RW 02 Desa muara uwai, dan beberapa masyarakat Desa muara uwai.

Sedangkan Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian dalam menemukan penelitian Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa orang masyarakat di Kecamatan Bangkinang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu Teknik pengambilan sampel yang mana peneliti menemukan pengambilan sampel dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercayai untuk menjadi sumber data yang mengetahui masalah

mendalam, dimana semua anggota populasi 42 orang yang dijadikan sampel.

#### **Sumber Data.**

- a. Data Premier, yakni data yang diperoleh langsung dari Kepala KUA, RT 02 RW 02 Desa muara uwai dan masyarakat di Kecamatan Bangkinang dengan melakukan wawancara.
- b. Data Sekunder, yakni data yang di peroleh melalui dokumen, buku, dan catatan catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan masalah yang di telitii.

#### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi adalah mencurahkan segenap alat indra terutama pengamatan mata untuk mengamati fokus objek yang diselidiki. Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui secara langsung bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan wakalah wali pada akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Bangkinang.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang menunjukkan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang diinginkan serta yang dianggap perlu dalam penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu pendukung yang dikumpulkan sebagai penguat data dan observasi dan wawancara.
- d. Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti<sup>20</sup>

**Metode Analisis Data**

Adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat alat statistic yang relevan untuk di gunakan dalam penelitian. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi situasi lapangan. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari hal hal yang bersifat umum kepada hal hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang diteliti.

**8. Teknik Penulisan.**

- a. Deskriptif, yaitu metode dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan, dan di ambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga dapat di susun sebagaimana di perlukan dalam penulisan ini.
- b. Induktif, yaitu metode Analisa data yang berangkat dari factor-faktor yang bersifat khusus untuk di Tarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode induktif ini, peneliti menangkap berbagai factor atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang di amati.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-1, h.14.

<sup>21</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), \h. 138.

## F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisikan uraian tentang Sejarah Keberadaan Kantor Urusan Agama Bangkinang, Visi dan misi Kantor urusan agama (KUA) kec Bangkinang, Tugas dan Tanggung Jawab Kantor urusan agama (KUA) kecamatan Bangkinang.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Membahas tentang konsep wali (pengertian wali, syarat syarat wali, macam macam wali nikah serta urutannya, fungsi wali dalam pernikahan, hikmah wali dalam pernikahan). Konsep wakalah (pengertian dan dasar hukum wakalah, rukun wakalah, pendapat ulama tentang wakalah, wali dalam kompilasi hukum islam).

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang Pelaksanaan wakalah wali di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan wakalah wali di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

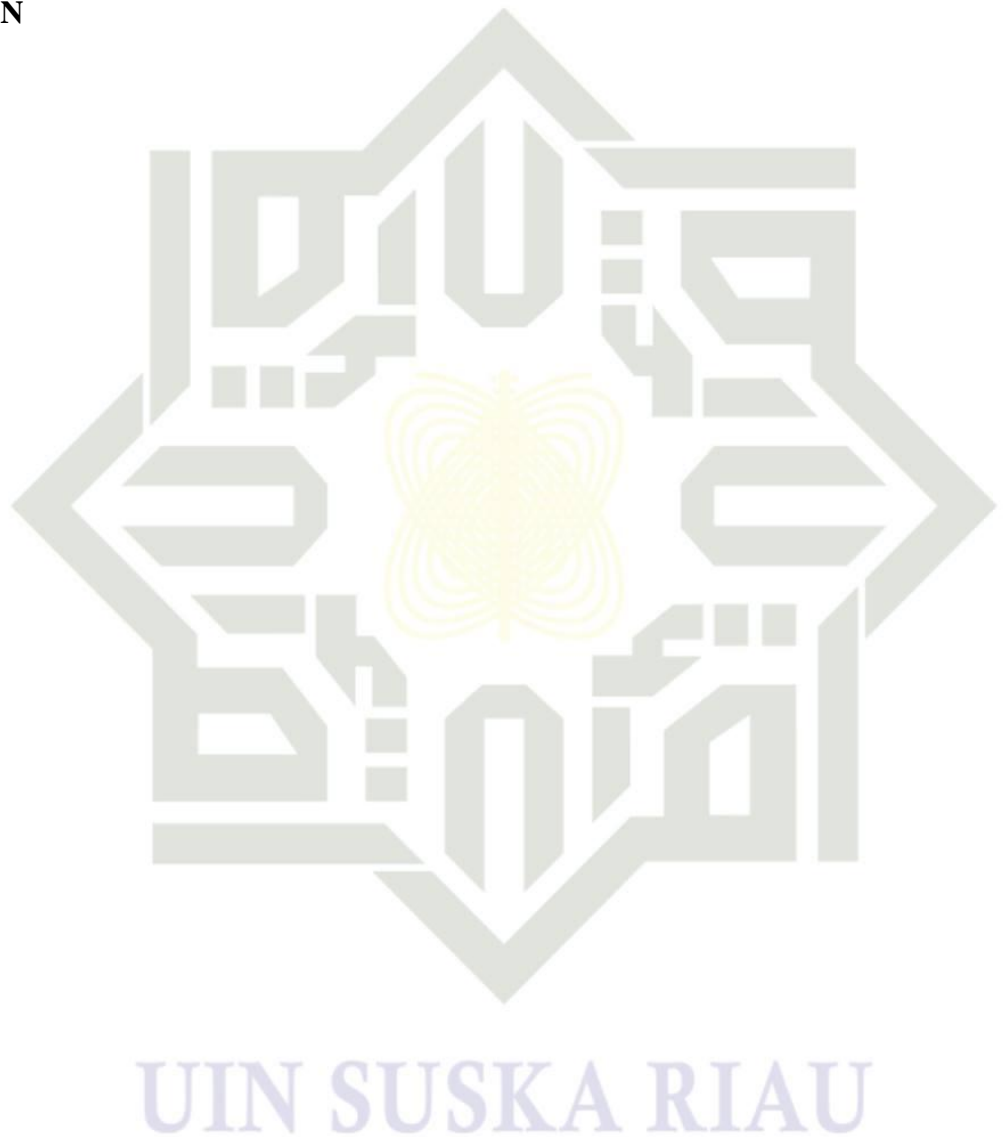
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**







1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Keberadaan Kantor Urusan Agama Bangkinang.

Kantor urusan agama (KUA) mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia, baik yang berkenaan dengan kelembagaan maupun dengan peran dan fungsinya. Keberadaannya dapat dilacak sejak permulaan masuk Islam ke Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan kesultanan Islam, masa kolonialisme, hingga masa kemerdekaan. Sepanjang itu Kantor urusan agama (KUA) mengalami dinamika dan transformasi kelembagaan, baik peran maupun fungsinya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 1 bahwa Kantor urusan agama (KUA) adalah instansi Departemen agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Berdirinya Kantor urusan agama (KUA) berawal dari Departemen Agama melakukan tindakan unifikasi dan sentralisasi secara integral. Kunci utama dalam usaha itu adalah pembentukan Kantor urusan agama (KUA). Kantor urusan agama (KUA) di seluruh cabang dari kantor pusat nasional yang dibentuk pemerintah Jepang di Jawa, menggantikan kantor Voor Inlandsche Zaken, yang pada waktu itu mempunyai cabang kepresidenan kementerian agama yang kini membentuk Kantor urusan agama (KUA) di daerah dengan jabatan pusat di Jakarta, provinsi, kabupaten dan kecamatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sedangkan ditingkat desa terdapat penjabat agama yang tidak termasuk dalam hirarki, penjabat di desa bisa disebut dengan Modin, Kaum, Kayimm, Lebay DSB adalah termasuk pamoong desa, yang administrasinya dibawah pemerintah umum.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor urusan agama (KUA) kecamatan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi dari Kantor urusan agama (KUA) kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, pengarsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor urusan agama (KUA)
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pada tahun 2006 Kantor urusan agama (KUA) kecamatan Bangkinang pecahan dari Kantor urusan agama (KUA) kota dan setelah itu terjadinya pemekaran daerah dan Kantor urusan agama (KUA) pertama kali didirikan di Balai adat kecamatan Bangkinang yang paling tepatnya di desa Muara Uwai kemudian sekitar 5 tahun berada di Balai adat tersebut dan pindah 2012 ke gedung baru dan ditetapkan 9 desa dengan Ikarar Waqaf 20 M X 20 M, sejak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

disahkan keberadaan KUA kecamatan Bangkinang telah 5 lima kali terjadi pergantian pemimpin kantor yaitu:

- a. Muntazar,S.Ag
- b. Eri Suparjon, S.Ag, M.Sy
- c. Damirus, S.Ag, MH
- d. H. Rusman,SH
- e. Drs.H. Zukirman

Kecamatan Bangkinang meliputi 2 kelurahan, 7 desa diantaranya:

1. Desa Pulau Lawas
2. Kel Pasir Sialang
3. Desa muara uwai
4. Kel Pulau
5. Desa Laboy Jaya
6. Desa Suka Mulya
7. Desa Bukit Sembilan
8. Desa Binunang.

Kantor urusan agama (KUA) kecamatan Bangkinang tepatnya di jalan KH, Nur Mahyudin No. 104 di desa Binunang kecamatan Bangkinang dengan menempati bangunan panjang 20M X 20M. Kantor ini juga memiliki ruangan, terdapat 5 ruangan diantaranya:

- a. Ruangan kepala penghulu
- b. Ruangan wakil penghulu
- c. Ruangan kantor penyuluh agama



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ruang administrasi
- e. Ruang BP4 dan balai nikah.

Dan memiliki pegawai 6 orang terdiri, kepala penghulu, wakil penghulu, penyuluh PNS, pegawai administrasi dan 2 orang tenaga honorer dan dibawah penyuluh PNS terdapat 8 orang penyuluh agama non PND dan terdapat beberapa desa.

#### B. Visi dan misi Kantor urusan agama (KUA) kec Bangkinang.

Visi dan misi merupakan dua kata yang tidak mungkin terpisahkan dalam membangun dan mengembangkan suatu kegiatan, karena visi tanpa misi ibaratkan seseorang yang memiliki tujuan ke suatu daerah tanpa memikirkan kendaraan apa dan bagaimana cara mencapai daerah tersebut, sedangkan misi tanpa visi ibaratkan kendaraan dan perlengkapan yang lengkap untuk melakukan traveling akan tetapi tidak mempunyai arah dan tujuan.

Visi merupakan target dan tujuan yang harus dicapai oleh suatu kegiatan, sedangkan misi adalah strategi yang harus ditetapkan oleh kantor untuk memperlancar dan membantu kinerja kantor itu sendiri dalam membantu tugas tugas yang telah ditetapkan dan mencapai target yang diinginkan. Oleh karena itu Kantor urusan agama (KUA) kec Bangkinang merancang dan menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

##### 1. Visi

“Terbentuknya masyarakat Islam, berakhlakul karimah dan terwujudnya pelayanan yang prima di kec Bangkinang profesional dalam tugas ramah

dalam pelayanan ikhlas dalam berhikmah maksimal dalam berkerja amanah dalam mengemban tugas”.

2. Misi.

- a. Meningkatkan pelayanan di bidang organisasi dan tatalaksana
- b. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi nikah dan rujuk
- c. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kependudukan dan keluarga sakinah.
- d. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan
- e. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi zakat, waqaf dan shadaqah serta ibadah sosial.
- f. Meningkatkan teknis informasi.

**C. Tugas dan Tanggung Jawab Kantor urusan agama (KUA) kecamatan Bangkinang.**

1. Kepala Kantor urusan agama (KUA)

Berdasarkan keputusan menteri agama nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor urusan agama (KUA) tugas kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten atau kota dibidang urusan agama dalam wilayah kecamatan , dengan demikian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin bawahan atau pelaksana yang terdiri dari petugas tata usaha dan petugas lainnya yang menjadi wewenangnya.
- b. Memberikan pedoman, dibawah pimpinan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi vertikal Departemen Agama lainnya maupun antara unsur departemen di kecamatan dengan unsur pemerintah daerah.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kantor Departemen agama Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala Kantor urusan agama (KUA) dapat didelegasikan sebagian tugasnya supaya pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh yakni dengan langkah mendefinisikan tugas dengan jelas seperti kewajiban Kantor urusan agama (KUA) selaku kepala PPN (petugas pencatat nikah ) untuk melaksanakan tugas dan pengawasan PPN.

2. Penyuluh.

Berdasarkan keputusan menteri negara koordinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999, tugas penyuluh yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan dibidang penyuluhan agama Islam , pemberdayaan lembaga, pengembangan materi dan metode penyuluhan.

3. Tata Usaha.

Melaksanakan pelaksanaan dan penyelenggaraan tata usaha dan rumah tangga Direktorat, mengolah data dan informasi , menginventarisasi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

4. Penghulu.

Berdasarkan peraturan MENPAN Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 penghulu memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan, pencatatan nikah dan rujuk pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk penasihat dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah serta pemantau dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja kepada masyarakat dibidang perkawinan dan pengembangan keluarga sakinah dipandang perlu melakukan penataan organisasi Kantor urusan agama (KUA) kecamatan. Struktur organisasi adalah bagian yang menggambarkan tingkat tingkat organisasi dan kegiatan kegiatan organisasi pada umumnya dan juga termasuk hal yang paling penting untuk sebuah kantor, seperti halnya Kantor urusan agama (KUA) kecamatan bangkinang. Pelaksanaan kegiatan dari masing masing bagian mempunyai tugas pokok yang dibebankan kepada kantor tersebut. Dari penjelasan struktur organisasi diatas, maka untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada deskripsi pekerjaan dibawah ini:



© Hak cipta milik U

Riau

Islamic

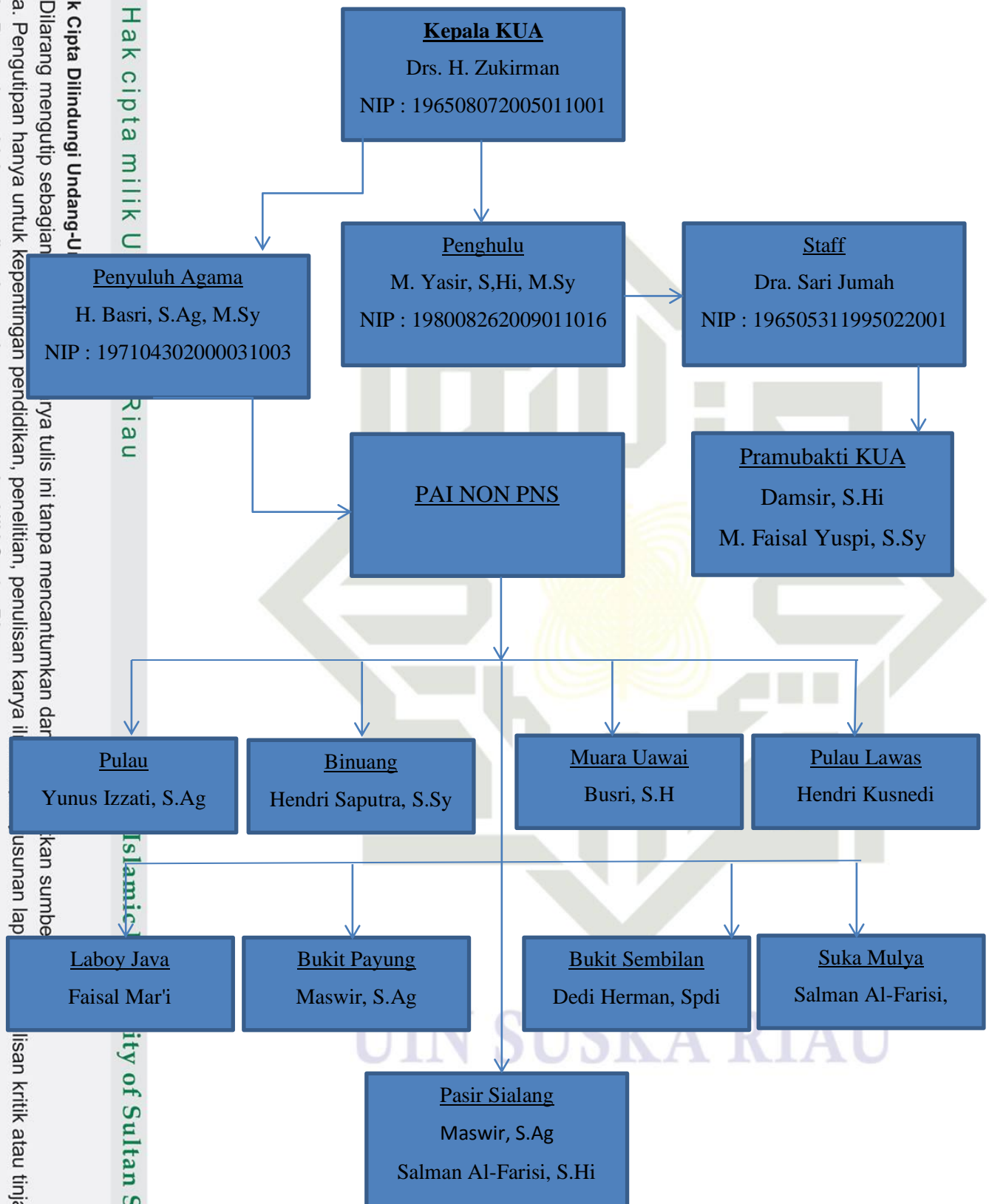
ity of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Ui

1. Dilarang mengutip sebagian

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya il
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH YANG BERWAKIL

#### A. Konsep Wali Nikah.

##### 1. Pengertian Wali Nikah.

Kata wali dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai:

- a. Wali adalah orang yang menjadi penjamin dipengurusan dan penjamin anak.
- b. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.<sup>22</sup>

Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah berarti penguasa dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah penguasa penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>23</sup> Dalam fiqh sunah di jelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah wali yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet Ke-4, hal. 1555

<sup>23</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 92

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 7*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hal 11..



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>25</sup> Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah dengan seorang pengantin laki-laki.<sup>26</sup> Maksudnya adalah orang yang mendidik perempuan tersebut sampai ia mendapatkan pasangan dalam hidupnya. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang Syar'ii atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada seseorang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.<sup>27</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurangnya cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

Wali dalam perkawinan merupakan rukun, artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Adanya wali bagi seorang wanita atau seorang yang tidak mukalaf dalam akad nikahnya merupakan rukun akad nikah tersebut. Dasar hukum adanya wali ini dalam pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 yaitu:

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 90

<sup>26</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 165

<sup>27</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mashab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 345.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  
٢٣٢

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”<sup>28</sup>

#### 2. Syarat Syarat Wali.

Wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan. Karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang menjadi objek perwalian dalam mengepresikan dirinya. Oleh karena itu tidak semua orang diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut.

##### a. Islam.

Orang yang tidak Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 51:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim

<sup>28</sup> Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1996), Cet. Ke-3, hal. 29

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

##### b. Baligh dan Berakal.

Orang tersebut telah bermimpi Junub / Ihtilam (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun .Orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. Baik orang yang tidak berakal tersebut karena keberadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilangnya ingatan atau karena faktor lanjut usia.<sup>29</sup>

##### c. Merdeka.

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak, sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan ulama Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya, dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri.<sup>30</sup>

##### d. Laki-laki.

Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya, terkandung dalil bahwa wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan orang lain. Namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang berakal dan baligh

---

<sup>29</sup> Syekh Hasan Ayyub, "*Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*", Diterjemahkan M. Abdul Ghafur, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 2003), Cet Ke-3, hal. 89 .

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 89.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan anak perempuan dibawah umur serta mewakili orang lain.

e. Adil.

Adil adalah seseorang itu berpegang kuat (Istiqamah) kepada ajaran Islam, menunaikan kewajiban agama, mencegah dirinya melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, minum arak, durhaka kepada kedua orang tua ibu bapak dan lain-lain, serta berusaha tidak melakukan dosa-dosa kecil. maksudnya adalah seorang wali tersebut adalah orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan kecil. Wali disyaratkan adil karena ia bertanggung jawab dari segi kehendak agama ketika membuat penilaian bakal suami bagi kepentingan dan maslahat bagi perempuan yang hendak dinikahkan kepadanya.<sup>31</sup>

### 3. Macam-Macam Wali Nikah Serta Urutannya.

Jumhur ulama di antaranya Imam Malik, Asy Syafi'i, Ats Tsauri dan Al Laits bin Saad berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah *ashabah*, bukan paman, bukan saudara seibu dan bukan *Dzawil Arham* lainnya.

Kata Imam Syafi'i adalah pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali apabila dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat), kalau tidak ada wali dekat maka dinikahkan oleh wali *ab'ad* (jauh) kalau tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim) dan urutannya sebagai berikut:<sup>32</sup>

<sup>31</sup> H.M. Tihani dk, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hal. 211

<sup>32</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hal 112.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Ayah
2. Kakek
3. Saudara laki laki sekandung
4. Saudara laki laki seayah
5. Anak laki laki dari Saudara laki laki sekandung
6. Anak laki laki dari Saudara laki laki seayah
7. Paman sekandung
8. Paman seayah
9. Anak laki laki dari paman sekandung
10. Anak laki laki dari paman seayah
11. Hakim

Abu hanifah berpendapat bahwa hak untuk menjadi wali juga di berikan kepada selain *ashabah* , misalnya paman dari pihak ibu serta anak dari paman tersebut dan anak ibunya (saudara laki laki seibu). Pendapat ini dikuatkan oleh Sayid Siddiq Hasan Khan, pengarang *Raudhatul Nadiyyah*.

Ada empat macam wali nikah yaitu: *Wali nasab*, *wali maula*, *wali tahkim*, dan *wali Hakim*.<sup>33</sup>

#### a. Wali Nasab.

Adalah wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab dikalangan ulama fikih Terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Syaf'i dalam urutan perwalian yang pertama adalah *ayah*, *kakek dari pihak ayah*,

<sup>33</sup> H.M. Tihami dk, *Loc. Cit*, hal. 95

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, dan apabila semuanya itu tidak ada, maka perwalian pindah ketangan wali hakim.*

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu:

#### 1) Wali nasab mujbir

Mujbir artinya orang yang memaksa. Sedangkan wali nasabmujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untukmengawinkan calon mempelai perempuan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dan batas-batas yang wajar. Yang termasuk dalamkategori wali mujbir adalah ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wali nasab mujbir, yaitu:

- a) Tidak ada permusuhan antara bapak dengan anak
- b) Hendaknya dinikahkan dengan orang yang setara (sekufu)
- c) Maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding)
- d) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak mampu membayar mahar
- e) Tidak di nikahkan dengan laki-laki yang mengecawakan (membahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu. Misalnya orang laki-laki tersebut buta atau orang yang sudah tua sehingga tidak ada harapan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam pergaulannya.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 42



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Selamat Abidin dan Aminuddin, apabila syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka hak ijabar menjadi gugur. Berdasarkan beberapa syarat di atas, maka menurut Selamat Abidin dan Aminuddin, ijabar tidak tepat diartikan sebagai paksaan, akan tetapi lebih tepat bila diartikan sebagai pengarahan.<sup>35</sup>

Di samping itu, bagi perempuan yang sudah dewasa dan bisa menentukan baik dan buruk sesuatu perkara, baik perempuan itu masih perawan atau janda, maka boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang dicintai tanpa memerlukan adanya wali, dengan syarat calon suami memiliki status yang sama dengannya. Akan tetapi, ketika suami tidak memiliki status yang sama dengan dirinya dan sering terjadi percekocokan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, maka walinya berhak menggugat cerai kepada suaminya tersebut.<sup>36</sup>

Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa: bapak tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang perawan tanpa izinnnya terlebih dahulu dari anaknya itu. Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal meminta izin kepada anak gadis tentang pernikahannya. Syafi'i, Ibnu Abi Laila, Ahmd, Ishaq dan lainnya mengatakan meminta izin kepada anak gadis merupakan perintah, namun jika walinya ayah dan kakek, maka hukumnya hanyalah anjuran, bukan wajib, karena sempurna kasih sayang antara keduanya. Adapun apabila walinya selain ayah dan kakek maka

<sup>35</sup> Selamat Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat, Jilid. 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 96.

<sup>36</sup> Muhammad Asmawi, *Op. Cit*, hal. 80-81.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib meminta izin kepadanya dan tidak sah nikah sebelum ada izinnya. Al-auza'i, Abu Hanifah dan ulama kufah lainnya mengatakan wajib minta izin kepada setiap gadis yang sudah dewasa.

#### 2) Wali nasab biasa.

Dikatakan sebagai wali nasab biasa, karena wali nasab tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa kawin kepada calon mempelai perempuan. Wali nasab bisa terdiri dari saudara laki-laki kandung atau seayah, paman yaitu saudara laki-laki ayah baik kandung atau seayah dan seterusnya anggota laki-laki menurut garis keturunan patrilineal.

Di samping itu, mazhab Syafiiyyah merumuskan urutan wali dalam pernikahan, adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a) Ayah kandung.
- b) Ayah dari ayah (Kakek)
- c) Saudara laki-laki seayah dan seibu (saudara kandung)
- d) Saudara laki-laki seayah.
- e) Anak laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki.
- f) Anak laki-laki dari saudara seayah.
- g) Saudara laki-laki ayah (paman)
- h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga jika ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wali pada nomor urutan

<sup>37</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hushaini, *Kifayah alAkhyar fi Hifz al-Hayyah al-Iktisar*, (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), hal. 312.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikutnya. Kecuali, bila pihak yang bersangkutan memberi izin kepada urutan yang setelahnya.

Kemudian, pentingnya untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakili hak perwaliannya itu kepada orang lain,<sup>38</sup> meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang syah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dan orang yang mewakili. Akan tetapi sebaliknya apabila pihak wanita mewakili kepada orang lain tanpa ijin dari wali maka pernikahannya tidak sah.

b. Wali Maula.

Wali maula adalah perwalian yang digunakan untuk menikahkan budak yang telah dimerdekakan, dengan kata lain wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya rela menerimnya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Sedangkan wanita yang wali nasabnya tidak diketahui siapa dan dimana hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Maka walinya adalah orang yang memerdekakan, selanjutnya adalah famili famili atau sahabat dari orang yang telah memerdekakannya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Imam Nawawi, *Op. Cit*, hal. 305

<sup>39</sup> H.M. Tihami dk, *Op Cit*, hal. 99



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Wali Muhakam.

Wali muhakam adalah wali nikah yang terdiri dari seorang lakilaki yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk menikahkan mereka, dikarenakan tidak adanya wali nasab, baik karena tidak memenuhi syarat atau menolak dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab.<sup>40</sup>

d. Wali Hakim.

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau Qadhi. Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa, atau Qadhi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwakil hakim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

1. Tidak ada wali nasab.
2. Tidak cukup syarat-syarat wali agrab atau wali ab'ad
3. Wali agrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh dua hari perjalanan.
4. Wali agrab dipenjara dan tidak bisa ditemui.
5. Wali agrabnya adhal.
6. Wali agrabnya berbelit-belit (mempersulit).
7. Wali agrabnya sedang ikhram.
8. Wali agrabnya sendiri yang akan menikah.

<sup>40</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: UI Press, 1982), hal. 45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada<sup>41</sup>

Para Ulama fikih sepakat bahwa urutan wali dalam pernikahan terdiri dari:

1. Ayahnya
2. Kakeknya (ayah dari ayah mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki seibu seayah dengannya
4. Saudara laki-laki yang seayah saja dengannya
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seayah dengannya
6. Saudara ayah yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
7. Anak laki-laki paman dari pihak ayahnya
8. Hakim

Diantara urutan wali yang disebutkan diatas bapak dan kakek diberi keistimewaan yang berupa hak menikahkan anaknya yang perawan dengan tidak meminta izin dengan si anak terlebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandangnya baik. Kecuali anak yang sayib (bukan perawan lagi), tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya terlebih dahulu. Sedangkan wali-wali yang lain berhak menikahkan mempelai setelah mendapat izin dari mempelai itu sendiri.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan masalah wali hakim, dinyatakan didalam pasal 23 KHI yang berbunyi:

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 98

<sup>42</sup> Sulaiman Rasjid, *Loc. Cit*, hal. 384

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sebelumnya telah di terangkan bahwa wali anak perempuan merupakan hak dari wali aqrab yang tidak dapat berpindah kepada wali lain atau kepada penguasa, kecuali apabila ada sebab-sebab yang dapat diterima. Hal-hal yang menyebabkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali hakim, yaitu Apabila ada sangketa antara wali, dan Apabila tidak ada wali. Hal ini dibenarkan apabila telah jelas tidak adanya wali atau wali tidak berada pada tempat.<sup>43</sup>

#### 4. Fungsi Wali Dalam Pernikahan.

Dari beberapa rukun pernikahan menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan pernikahan. Bahkan menurut Imam Syafi'i "I tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan pihak laki-laki tidak diperlukan adanya wali nikah."<sup>44</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa fungsi wali nikah sebenarnya adalah sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun Dalam praktek

<sup>43</sup> Inpres No. 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: tp, tt), hal. 28.

<sup>44</sup> Moh. Idris Ramolyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran), sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan ijab itu diwakilkan kepada walinya, jadi wali disini sekedar sebagai wakil, karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.<sup>45</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa fungsi wali adalah sebagai pengganti dari perempuan yang akan melangsungkan akad nikah, akan tetapi yang berlaku pada masyarakat di jazirah Arab pada waktu awal Islam, wali dapat menikahkan anak perempuannya tanpa melalui izin anak perempuan yang akan dinikahkan, ketika Islam datang praktek menikahkan tanpa persetujuan dari anak perempuan kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

#### 5. Hikmah Wali dalam Pernikahan.

Hikmah di Syariatkannya wali dalam pernikahan disebabkan dalam Islam hubungan anak dengan orang tua harus terjaga jangan sampai terjadi perpecahan sampai anak tersebut memiliki rumah tangga sendiri, penyebab perpecahan tersebut sering terjadi karena calon suami dari anak perempuan tersebut tidak direstui oleh orang tuanya, oleh karena itu ketika seorang perempuan mencari calon suami perlu adanya perantara dari wali supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dengan walinya.

Hikmah wali dalam pernikahan juga disebabkan karena perempuan jarang berteman dengan laki-laki, jadi wajar kalau perempuan tersebut tidak begitu paham tentang tabiat seorang laki-laki, maka agar perempuan tersebut

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 217

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak tertipu oleh seorang laki-laki dibutuhkanlah seorang wali, karena wali lebih tahu tentang tabiat seorang laki-laki sebab sering bergaul dengan mereka atau karena sesame lelakinya jadi lebih paham mana laki-laki yang baik dan tidak baik.<sup>46</sup>

Hikmah yang terkandung dibalik keharusan adanya wali dalam pernikahan sebenarnya lebih ditekankan pada permasalahan kecocokan antara calon suami kepada keluarga perempuan, maksudnya adalah apabila hubungan antara calon suami dengan keluarga perempuan dari awal tidak disetujui oleh wali maka selanjutnya bagi keluarga anak perempuan dengan keluarga orang tua akan mengalami permasalahan, padahal dalam Islam sangat ditekankan masalah silaturahmi, permasalahan diatas dapat dicegah manakala dalam proses perkawinan wali ikut di dalamnya, apabila dikemudian hari ada permasalahan, wali juga akan membantu menyelesaikan perkara tersebut karena sejak awal wali dilibatkan dalam perkawinannya.

### B. Konsep Wakalah.

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakalah.

Wakalah menurut bahasa adalah (كل- وكل- ووكولا Menyerahkan).<sup>47</sup>

Sebagaimana dalam bahasa arab di jelaskan.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hal. 24

<sup>47</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet Ke-14, hal. 1579

<sup>48</sup> Shalih Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 428

فوضت أمري الى الله

“Aku telah serahkan kepada Allah”

Sedangkan menurut istilah dalam beberapa kitab menjelaskan sebagai berikut:

- a. Menurut Moh Rifa’i dalam bukunya Ilmu Fiqih Islam Lengkap memberikan definisi Wakalah adalah Penyerahan sesuatu kepada seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa digantikan kepada orang lain agar orang itu mengerjakan semasa hidupnya.<sup>49</sup>
- b. Menurut Zainuddin dalam bukunya Al-Islam 2, (Muamalah dan Akhlak) mendefinisikan Wakalah adalah Menjaga atau menyerahkan, maksudnya menyerahkan harta atau pekerjaan kepada orang lain agar dijaga atau dikerjakan.<sup>50</sup>
- c. Shalih Al-Fauzan dalam bukunya Fiqih Sehari-hari mendefinisikan Wakalah adalah Perwakilan pada perkara-perkara yang boleh disepakati oleh wakil seperti mewakilkan pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Moh Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Toha Karya Putra, 1978), hal. 43

<sup>50</sup> Zainuddin dk, *Al-Islam 2*, (Muamalah dan Akhlak), (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 163

<sup>51</sup> Shalih Fauzan, *Loc. Cit*, hal. 428



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqih Islam, Wakalah adalah Menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain agar dikerjakannya (wakil) sewaktu hidupnya (yang berwakil),<sup>52</sup>
- e. Tengku Muhammad Hasby Ash-Shadigi dalam bukunya Hukum-Hukum Fiqih Islam Wakalah adalah Seseorang yang menyerahkan kepada orang lain sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup si pemberi kuasa, dengan cukup rukun dan syaratnya. dan sah memberi kuasa dalam segala akad yang dapat diganti. Pemberi kuasa itu suatu akad yang dibolehkan.<sup>53</sup>

Jadi kesimpulan penulis mengenai pengertian wakalah adalah meyerahkan ekuasaan pekerjaan yang dapat dikerjakan sendiri tetapi diserahkan kepada orang lain yang dianggap mampu untuk mengerjakannya.

Hukum wakalah itu sunah, kadang menjadi wajib kalau terpaksa, haram kalau pekerjaan itu haram, dan makruh kalau pekerjaan itu makruh. Firman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا  
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى  
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا  
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١٩

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah

<sup>52</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), Cet Ke72, hal.320

<sup>53</sup> Tengku Muhammad Hasby Ash-Shadigi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal.391

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”*

Wakalah atau mewakilkan akad diperbolehkan dalam Islam, karena orang memerlukannya dalam hidup untuk bermuamalah. Para ulama sepakat bahwa setiap akad yang dapat dilakukan oleh seseorang, oleh dirinya sendiri maka akad itu dapat diwakilkan kepada orang lain, misalnya jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak, kawin, cerai dan akad akad lainnya.

Dalam akad nikah apabila dalam salah satu pihak, pihak laki laki tidak hadir, ia dapat memberikan kuasa atau mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan ijab kabul.

## 2. Rukun Wakalah.

- a. Orang yang diberi kuasa (*Al-Wakil*)

Wakalah sah dilakukan oleh seorang laki laki yang sudah dewasa dan sehat akalnya. Orang dewasa dan sehat akalnya dipandang sempurna kecakapannya. Orang yang cakap berbuat menurut hukum dapat mengkawinkan dirinya sendiri dan dapat mewakilkan kepada orang lain. Sedangkan orang yang tidak cakap berbuat hukum, atau kurang kecakapannya tidak berhak mewakilkan kepada orang lain, seperti orang gila, orang dungu mereka tidak dibenarkan untuk mengkawinkan dirinya sendiri.

Syarat-syarat pemberi kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syariat untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

olehnya kepadanya. Oleh karena itu, menurut Imam Malik, tidak sah memberi kuasa kepada anak kecil dan orang gila, demikian pula menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak sah memberi kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah, bahkan menurut Imam Syafi'i, memberi kuasa kepada seorang wanita hukumnya tidak sah, baik ia melakukannya secara langsung atau melalui perantara, yakni ia memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan akad nikah. Tetapi menurut Imam Malik boleh jika perantaranya adalah seorang laki-laki.<sup>54</sup>

Ada beberapa persoalan yang terkenal berkenaan dengan hukum hukum penerima kuasa. Antara lain, jika ia diberi kuasa untuk menjual sesuatu, bolehkah membeli suatu itu untuk dirinya sendiri.

Dalam beberapa kondisi Imam Malik membolehkannya, akan tetapi untuk beberapa kondisi tidak dibolehkan. Persoalan lain, jika seseorang memberi kuasa kepada orang lain secara mutlak dalam bentuk jual beli. Imam Malik berpendapat, penerima kuasa itu tidak boleh menjual kecuali berdasarkan harga pasar, secara tunai dan dengan mata uang di negeri itu. Jika ia membayar dengan pembayaran kemudian dan tidak berdasarkan harga pasar, maka hal tersebut tidak dipebolehkan, hal seperti ini berlaku pula pada pembelian.

- b. Orang yang memberi kuasa (Al-Muwakkil)

Para fuqaha sependapat atas kebolehan memberi kuasa dari orang yang bepergian, orang yang sakit, dan orang perempuan, yang

<sup>54</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah : M. A. Abdurrahman, dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa", 1990), Jus-3, hal. 370



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesemuanya memiliki urusan dirinya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pemberi kuasa dari orang yang tidak bepergian, lelaki dan sehat. Imam Malik berpendapat bahwa pemberi kuasa dari seorang laki-laki yang sehat dan tidak bepergian itu dibolehkan. Imam Syafi'i juga memegang ini. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemberi kuasa dari orang yang sehat dan tidak bepergian itu tidak boleh demikian pula dari seorang perempuan, kecuali jika ia seorang yang pemberani.<sup>55</sup>

Ulama yang memandang hukum dasarnya tidak boleh adalah bahwa tindakan orang lain tidak dapat mewakili tindakan yang lainnya kecuali dalam keadaan terpaksa, dan ini telah terjadi *ijma'* atasnya, maka ia mengatakan bahwa penggantian orang yang diperselisihkan penggantinya itu tidak dibolehkan.

Sebaliknya fuqaha yang berpendapat bahwa pada dasarnya penggantian tersebut dibolehkan, maka ia akan mengatakan bahwa pemberi kuasa pada semua perkara itu dibolehkan, kecuali pada perkara yang telah disepakati ketidak bolehan, yakni perbuatan-perbuatan ibadah dan yang semisalnya.

Menurut Fuqaha orang diberi kuasa boleh menarik penyerahan kekuasaan tersebut kapan saja menghendaki. Menurut Imam Malik kehadiran pihak lawan (dalam persengketaan) tidak menjadi syarat akad pemberian kuasa, ini juga berlaku didepan hakim. Ada tiga hal yang

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 369

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat “membebas tugaskan” seseorang penerima kuasa (*al-wakil*) berkaitan dengan pihak yang bekerja pada penerima wakil.<sup>56</sup>

- a. Kematian, pengunduran, dan pemecatan membatalkan semua pihak yang berkaitan dengan transaksi al-wakalah.
- b. Hak orang yang mengetahui kematian pemberi kuasa (*al-muwakil*) dan pemecatan penerima kuasa (*al-wakil*) itu batal
- c. Batalnya transaksi al-wakalah dapat juga membatalkan hak orang yang bekerja pada penerima kuasa (*al-wakil*) baik ia mengetahui kematian atau pemecatan penerima kuasa (*al-muwakil*) atau tidak.

Tetapi transaksi Al-wakalah tidak membatalkan hak penerima kuasa (*al-wakil*), walaupun orang yang bekerja dengannya mengetahui kematian atau pemecatan pemberi kuasa (*al-Muwakkil*), jika penerima kuasa (*al-wakil*) tidak mengetahui sendiri, sedangkan orang yang membayar sesuatu kepada penerima kuasa, maka ia harus menanggung semua kerugian karena secara sadar, orang itu membayar sesuatu kepada orang yang tidak menjabat sebagai penerima kuasa (*al-wakil*).

- c. Perkara yang Dikuasakan (*At-Taukil*).

Syarat objek pemberi kuasa adalah perbuatan yang dapat diganti oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan dan semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (*al-musaqah*), talak, nikah, khuluk dan perdamaian. Tetapi tidak

<sup>56</sup> Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid*, (Jakarta: Akbarmedia, 2015), hal. 502.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperkenan ibadah-ibadah Badaniah dan diperbolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta seperti zakat, haji, dan sedekah.<sup>57</sup>

Menurut pendapat Imam Malik, dibolehkan pengganti pada persengketaan atas pengakuan dan pengingkaran. Sedangkan Imam Syafi'i pada salah satu pendapatnya mengatakan tidak boleh ada penggantian atas pengakuan. ia mempersamakan hal ini dengan persaksian dan sumpah. Imam Malik juga berpendapat bahwasanya boleh memberi kuasa untuk menjalani hukuman.

#### **Pendapat Ulama Tentang Wakalah Wali.**

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki sesuatu ia berhak untuk merubah dan mewakilkannya pada orang lain, selama perkara tersebut merupakan suatu perkara yang sah jika diwakilkan dalam pelaksanaannya, maka sah setiap wali untuk mewakilkan akad nikah anaknya. berikut pendapat Imam Mazdhab tentang perwakilan wali nikah.

##### a. Pendapat Syafi'iyah

Menurut Syafi'iyah tidak diperbolehkan seorang wali mewakilkan perwaliannya pada orang lain, kecuali dengan izin perempuan. jika perempuan tersebut berkata kepadanya "wakilkanlah", maka dia dapat mewakilkan. Jika dia meolaknya, maka dia berhak untuk mewakilkan menurut pendapat yang shahih karena dengan izin ini dia menyerupai orang yang diberikan wasiat dan orang yang diberikan tanggung jawab.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 370.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua orang-orang ini memiliki hak untuk mewakili dengan tanpa izin, jika wali yang selain mujbir mewakili orang lain untuk melakukan pernikahan sebelum dia meminta izin kepada perempuan, maka dalam pendapat yang sah tidak sah, Karena dia tidak memiliki hak untuk mengawinkan perempuan itu dengan pelaksanaan dirinya sendiri.<sup>58</sup>

b. Pendapat Hanafiyah,

Menurut pendapat Hanafiyah boleh seorang wanita dewasa, baik perawan maupun janda untuk mewakili pernikahan pada orang lain untuk melangsungkan akad nikah. begitupun dengan seorang laki-laki yang memiliki kemampuan untuk menikah. dengan syarat dalam perwakilannya adalah seorang yang ahli dalam hal nikah baik laki-laki maupun perempuan. tidak sah wakilnya seorang anak kecil yang tidak berakal, dan juga seorang yang gila. Dan tidak perlu melaksanakan pengakuan dari wakil. Karena menurutnya seorang perempuan memiliki hak untuk mengawinkan dirinya sendiri, maka dia juga memiliki hak untuk mewakili orang lain dalam akad pernikahan. sebagai kaidah fikih yang berbunyi: “setiap perkara yang boleh dilakukan oleh seseorang yang boleh dilakukan oleh seseorang secara langsung untuk dirinya sendiri, maka dia boleh mewakili orang lain untuk melakukan hal tersebut, jika tindakan ini dapat diwakilkan.”<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilaturuhu*, Penerjemah. Abdul Hayyie AlKattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), Jilid Ke-9, hal. 207.

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 206.

c. Pendapat Hanabilah,

Menurut Hanabilah sah seorang wali mujbir atau selainnya boleh untuk mewakili pernikahan kepada kerabat dekat tanpa izin wanitanya. Karena wali berhak atas pelaksanaan akad nikah, maka mewakili pada orang lainpun adalah haknya wali. Dan syarat seorang wakil adalah izin dari wanita yang akan dinikahkannya setelah si wakil mendapat perwakilan dari wali wanita yang akan menikah, bukan sebelum mendapat perwakilan. Jika sebelumnya, maka tidak sah perwakilannya tersebut. Syarat seorang wali nikah sebagaimana syaratnya seorang wali, yaitu: laki-laki, dewasa dan selain kedudukannya sebagaimana yang telah disebutkan, tidak sah dalam melaksanakan perwakilan dalam nikahnya wanita selain dari keluarganya.<sup>60</sup>

Dari penjelasan di atas, bahwa perwalian dapat dilakukan dengan ungkapan maupun tulisan. Para ulama sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi pada saat perwakilan dilakukan.

Jumhur fuqaha, selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mewakili wali kepada orang lain selain walinya untuk menikahkannya. Karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri, maka dia tidak memiliki hak untuk mewakili orang lain dalam perkara ini. Akan tetapi, wali mujbir si perempuan boleh mewakili orang lain untuk menikahkannya tanpa

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 206.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seizin perempuannya. Sebagaimana seorang wali boleh menikahkan perempuan tanpa seizinnya.<sup>61</sup>

Penting diketahui bahwa seorang wali berhak mewakili hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh Ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah.

Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan tentang kebolehan perwakilan dalam pernikahan sebagaimana yang tercantum pada pasal 28 yaitu: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah juga dapat diwakilkan kepada orang lain”.<sup>62</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa di perbolehkannya mewakili perwalian nikah pada KUA. Karena jumhur fuqaha membolehkan mewakili perwalian pada orang lain selain kerabatnya sebagaimana yang dijelaskan diatas. Dan secara perundang-undangan juga memperbolehkan perwakilan wali dalam akad nikah.

Dalam praktek akad nikah sering terjadi pernikahan itu melalui wakil terutama pada pihak wali dari calon istri. Dalam pernikahan yang diwakilkan pada orang lain, walaupun wali ada yang ikut serta menyaksikan akad pernikahan anaknya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat.

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 206

<sup>62</sup> Abdurrahman, *Loc. Cit*, hal. 120



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kitab *Al-Muqhni* disebutkan, diperbolehkannya perwakilan wali nikah, baik walinya hadir maupun walinya tidak ada, baik walinya mujbir maupun walinya ghairu mujbir, karena telah diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW. Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mewakilkan pernikahannya dengan Ummu Habibah kepada Amru bin Umayyah. Dalam riwayat tersebut, Ibnu Qudamah berkata: “Dibolehkan mewakilkan dalam akad nikah dalam hal ijab dan qabul, karena Nabi SAW, mewakilkan Amru bin Umayyah dan Abu Rafi” untuk melakukan qabul (menerima pernikahan) baginya. Sesungguhnya Rasulullah Saw menikahi Ummu Habibah saat dia berada di Negeri Habasyah.

Wewenang wakil menurut Mazhab Hanafi terbatas sesuai dengan jenis perwakilan yang bersifat mutlak atau perwakilan yang bersifat terikat. Karena wakil mendapat kekuasaan dari orang yang wakili, maka dia hanya memiliki apa yang diwakili kepadanya. Tindakannya hanya berlaku pada apa yang diwakilkan kepadanya. Pada perkara yang lainnya, dia berada diluar area terlaksananya tindakan tergantung kepada pembolehan orang yang diwakili, serta pembolehan yang akan datang.<sup>63</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perwakilan wali dalam pernikahan di bagi menjadi dua, yaitu perwakilan secara mutlak (terbatas) dan muqayyad (terikat). yang dimaksud muqayyad adalah perwakilan dalam melakukan pernikahan tertentu, sedangkan mutlak adalah pernikahan orang yang disetujui atau yang dikehendaki.

<sup>63</sup> Wabah Zuhaili, *Loc. Cit*, hal. 208

#### 4. Wali Nikah dalam Kompilasi hukum Islam.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>64</sup>

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni: Muslim, akil baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim
- c. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan. Kelompok yang sah didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
  1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya
  2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah atau keturunan laki-laki mereka.
  3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
  4. Kelompok saudara klandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

<sup>64</sup> Abdurrahman, *Loc. Cit*, hal. 118

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- f. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni samasama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah.

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka menjadi wali sudah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat yang berikutnya.

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau ghaib, atau adhal, atau enggan.
- b. Dalam hal wali adhal atau walinya enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Dari penjelasan diatas mengenai perwalian dalam kompilasi hukum Islam maka wakalah wali dalam akad nikah dapat berlangsung apabila telah memenuhi syarat dalam pelaksanaannya. adapun syarat pelaksanaan wakalah wali tersebut jika di tinjau menurut pendapat Imam Abu hanifah adalah orang yang tidak bepergian, tidak sakit, dalam keadaan sehat, maka walinya tidak dapat di wakikan dan harus diwalikan secara langsung. tetapi Imam Syafi'i, Imam Malik diboolehkan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan permasalahan pada pelaksanaan wakalah wali dalam akad nikah yang telah dibahas dalam Bab sebelumnya yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, maka sebagai jawaban dari permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan wakalah wali dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang terjadi karena adanya beberapa faktor diantaranya yaitu: Masyarakat lebih percaya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang dari pada diri sendiri dan lain lain. Karena ketidak ada motivasi, dorongan serta upaya dari kepala kua kepada orang tua untuk dapat menikahkan secara langsung pada prosesi akad nikah. Masyarakat Bangkinang berpendapat terjadinya wakalah wali dalam akad nikah karena pelaksanaan tersebut sudah menjadi budaya masyarakat di Kantor Urusan Agama.
2. Ditinjau dari hukum Islam terhadap kedudukan wakalah wali dalam akad nikah yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang pada dasarnya sudah menjadi budaya masyarakat tersebut. sehingga banyak masyarakat bangkinang yang ketika melaksanakan akad nikah hak perwalian diwakilkan kepada pegawai yang memimpin dan menyaksikan jalannya akad nikah tersebut. Sedangkan jika ditinjau dari hukum Islamnya bahwanya pelaksanaan wakalah wali di bolehkan baik secara mutlak maupun muqayyad.

## B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama ini, maka penulis menyarankan kepada:

1. Para tokoh agama/ulama agar selalu mengingat kepada masyarakat atau wali nikah akan pentingnya posisi wali bagi calon pengantin perempuan dalam prosesi akad nikah berlangsung, baik melalui pengajian atau media lainnya.
2. Bagi masyarakat Bangkinang pada umumnya (terutama yang memiliki hak atas perwalian terhadap anaknya) agar mau dan sanggup menggunakan hak perwaliannya tersebut. Jika ketidak mampuan dan ketidak sanggupannya tersebut dijadikan suatu alasan dalam perwakilan wali nikah, maka sayangnya mereka orang tua yang mempunyai hak perwalian tersebut bertanya kepada orang yang berilmu, banyak berkonsultasi dan mendengarkan pengajian-pengajian Ilmu Agama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1973)
- Abdul Qodir Zaelani, *Konsep Ta'aqquli dan Ta'abbudi dalam Konteks Hukum Keluarga Islam*, dalam *Jurnal ASAS Volume 6 Nomor 1*, 2014
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Presindo, 2015)
- adalah orang adil, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Tihami, Hari Sahrani, *fiqh munakahat kajian fikih nikah lengkap*, Rajawali press, Jakarta, 2010
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan ke 11, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: UI Press, 1982)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2000
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Grogressif, 1997), Cet Ke-14
- Al-Bukhori, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Ensiklopedia Hadist; Shahih al-Bukhori 1*, terj. Masyar dan Muhammad Suhaidi, Jakarta: Almahira, Cet. 1, 2011
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Amir syarifudin *hukum perkawinan islam di Indonesia*, antara fikih munakahat dan dan undang undang perkawinan
- Anta Rahayu ( Masyarakat Bangkinang), *Wawancara*, Bangkinang Tanggal 06 Juli 2021.
- Anonim, tt, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, dilengkapi KHI Di Indonesia, Surabaya: Arkola.
- Azma ( Masyarakat Bangkinang), *Wawancara*, Bangkinang Tanggal 06 Juli 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum perdata (BW)*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1981
- Damsir (pegawai Kantor Urusan Agama Bangkinang), *Wawancara*, Kantor Urusan Agama, Bangkinang Tanggal 06 Juli 2021.
- Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1996), Cet. Ke-3
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet Ke-4
- Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-1
- Ernawati ( Masyarakat Bangkinang), *Wawancara*, Bangkinang Tanggal 06 Juli 2021.
- Fitriyani, *Hukum Islam dan Multikulturalisme di Indonesia, dalam Jurnal Tahkim Volume 12 Nomor 2 Tahun 2018*
- H.M. Tihami dk, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hal 112.
- Hasan, M Iqbal .*Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.Bogor: Ghalia Indonesia t.t2000.
- Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam*, (Medan: Universitas Dharmawangsa, 1983)
- <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/almaiyah/article/download/314/236/>
- Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid*, (Jakarta: Akbarmedia, 2015)
- Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid*, Penerjemah : M. A. Abdurrahman, dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa", 1990), Jus-3
- Ilyas M (pegawai Kantor Urusan Agama Bangkinang), *Wawancara*, Bangkinang Tanggal 06 Juli 2021.
- Indah lena , (Masyarakat Bangkinang,), *Wawancara* Tanggal 06 Juli 2021
- Indones No. 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: tp, tt),
- Juhansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra)
- Kompilasi hukum islam.* (Jakarta: Cemerlang t.t)
- La Jamaa, *Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam, dalam ASy-Syir"ah, Jurnal Ilmu Syari"ah dan Hukum*, Volume 47 No.1 Tahun 2013
- Mahadir Muhammad ( Masyarakat Bangkinang), *Wawancara*, Bangkinang Tanggal 06 Juli 2021.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989)
- Makmur (Ketua RT 02 RW 02 Bangkinang), *Wawancara*, Bangkinang Tanggal 06 Juli 2021.
- Maksudnya dilihat dari sisi kemampuan ia berpikir dan bertindak secara sadar dan baik maka seorang yang belum baligh tidak dapat dikatakan dewasa Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam peradilan menurut Hukum Islam*, Cet. I, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1986
- Moh Rifa"i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Toha Karya Putra, 1978)
- Moh. Idris Ramolyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Mhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mashab*, (Jakarta: Lentera, 2001)
- Mhammad Nazri ( Masyarakat Bangkinang), *Wawancara*, Bangkinang Tanggal 06 Juli 2021.
- Rafna Azwani ( Masyarakat Bangkinang), *Wawancara*, Bangkinang Tanggal 06 Juli 2021.
- Sa'yyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1968), Juz VI,  
\_\_\_\_\_, *Fiqih Sunah 7*, (Bandung: Al-Ma"arif, 1990),
- Selamat Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat, Jilid. 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Shalih Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* , (Jakarta: Gema Insani, 2006)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), Cet Ke72,

Syekh Hasan Ayyub, "*Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*", Diterjemahkan M. Abdul Ghafur, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 2003), Cet Ke-3

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hushaini, *Kifayah alAkhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar*, (Damaskus: Dar al-Khair, 1994)

Tengku Muhammad Hasby Ash-Shadigi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah. Abdul Hayyie AlKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Jilid Ke-9

Wawancara dengan Bapak M. Ilyas selaku RW, Dusun Uwai, Kecamatan Bangkinang, pada tanggal 16 Desember 2020.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.,Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Zainuddin dk, *Al-Islam* 2, (Muamalah dan Akhlak), (Bandung: Pustaka Setia, 1999)





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANGKINANG"**,

yang ditulis oleh:

Nama : **KHAIRUL AZMI**  
 NIM : 11721101181  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Agustus 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, SHL., MA**

Penguji I  
**Drs. Yusran Sabili, MAG**

Penguji II  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**

Mengetahui :  
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalhaus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: Khairul Azmi

: 11721101181

: Hukum Keluarga

**: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakalah Wali Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang**

**Pembimbing : H. Rahman alwi M.A**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**

NIP. 198804302019031010





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor: 004/F.1-PP.00.9/3629/2021

Pekanbaru, 30 April 2021

ifat: (tatu) Proposal  
am: Monon Izin Riset  
al

Monon Izin Riset

Kepada  
Yt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : KHAIRUL AZMI  
NIM : 11721101181  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : KUA Bangkinang

Termaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
Tinjauan hukum islam terhadap problematika perwalian akad nikah yang berwakil

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Kuasa Dekan



Dr. Wahidin., M.Ag  
NIP. 197101081997031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
c. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emusar  
ektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmpstsp@riau.go.id

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41147  
TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.PPP.009/3629/2021 Tanggal 30 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : KHAIRUL AZMI  |
| 2. NIM KTP           | : 11721101181   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBELMATIKA PERWALIAN AKAD NIKAH YANG BERWAKIL |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR URUSAN AGAMA BANGKINANG  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 April 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

#### Tambahan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang  
barang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
Fengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.

b. Fengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

## REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/408

Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON ZIN-RIE/4117 tanggal 30 April 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

: **KHAIRIL AZMI**  
: 11721101181  
: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU  
: HUKUM KELUARGA  
: S1  
: PEKANBARU  
: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBELMATIKA PERWALIAN AKAD NIKAH YANG BERWAKIL**  
: KANTOR URUSAN AGAMA BANGKINANG

Rekomendasi sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

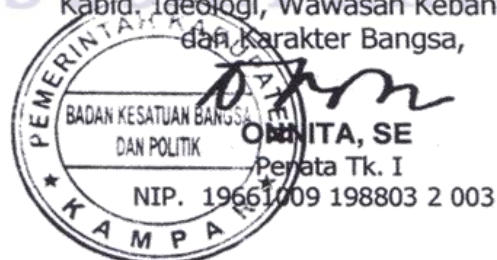
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 7 Juni 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Kantor Urusan Agama Bangkinang Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**Khairul Azmi** , lahir pada tanggal 25 Desember 1998 di Bangkinang, penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara, lahir dari pasangan Bapak M. Haidir dan Ibu Erliana, penulis bertempat tinggal di Dusun Telo Desa Muara Uwai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SD N 008 Muara Uwai Bangkinang, pada tahun 2004 dan selesai pada Tahun 2010, setelah itu melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di Pondok Pesantren Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang, hingga jenjang Aliyah di Pondok Pesantren Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang juga. Dan selesai pada tahun 2017, Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, mengambil Program Studi Hukum Keluarga pada Tahun 2017.

Pada Tanggal 06 Agustus 2021, penulis melaksanakan sidang munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakalah Wali Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang**” dan dinyatakan lulus dengan Ipk 3,37 berpredikat sangat memuaskan serta menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).